PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME INDONESIA

Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum
STKIP Widya Yuwana, Madiun

Abstract

Indonesia has founding fathers that have any brilliant ideas. At the time of drawing up the independence, they have debated each other for the sake of strong base of Indonesia. Their ideas have been embraced in conference brochure of BPUPKI. One of the figure that made especial reference in this paper is Soekarno. He have proposed Pancasila, even he embraced Pancasila in one term: "gotong-royong." The extortion of states of philsosophy of Indonesia is the spirit of "gotong-royong." Soekarno, in the reality, designed the "gotong-royong" as state of understanding for Indonesia. This paper has a purpose to digging the early idea of the founding of the nation., especially the Soekarno's idea of Pancasila and "gotong-royong." Specially, i hope, the discussion of this theme can give any contribution for Indonesian politic and social lives, of which to be felt decline in any ways progressively. Therefore, critical analysis to both of them become the especial pressure. The digging will be focused on Pancasila. Hereinafter, this paper will explain how this research can enrich multiculturalism of Indonesia. The critical contextualization for Indonesian daily live will be searched on last chapter.

Keywords: Pancasila, *multiculturalism*,"gotong-royong"

1. Model Penelitian

Negara Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya sangat brilian. Pada saat mempersiapkan kemerdekaan, mereka saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar yang kuat bagi berdirinya bangsa ini. Pendapat-pendapat mereka terangkum dalam risalah sidang BPUPKI. Salah satu tokoh yang hendak dijadikan rujukan utama dalam tulisan ini adalah Soekarno. Soekarno pernah mengusulkan Pancasila. Bahkan ia merangkum Pancasila dalam satu kata: "gotong-royong!"

Model penelitian yang digunakan dalam menggali tema ini ialah penelitian kualitatif bidang filsafat. Tulisan ini berfokus pada penggalian filosofis gagasan awali pendirian Negara Indonesia sebagaimana digagas oleh Soekarno ketika berpidato mengenai Pancasila. Penggalian akan gagasan filosofis awali tersebut diharapkan akan memberikan pendasaran bagi aneka praktek hidup bernegara, dan juga praktek mengenai bagaimana penghayatan multikulturalisme di Indonesia.

Data secara khusus dikumpulkan melalui sumber kepustakaan. Sumber primer yang diacu ialah pidato Soekarno tentang Pancasila di depan BPUPKI. Sumber primer ini diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995) yang berjudul "Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia." Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis hermeneutik. Hermeneutika dipilih supaya ditemukan maksud sesungguhnya dari Soekarno tentang Pancasila, sehingga ditemukan maknanya bagi Indonesia dewasa ini, terutama kepada bagaimana kontektualisasinya bagi multikulturalisme Indonesia.

2. Pembahasan

2.1. Pidato Soekarno Tanggal 1 Juni 1945

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentu ada dalam suatu posisi filosofis tertentu. Artinya, pidato ini ada dalam konteks pidato-pidato para tokoh yang lain (yang tentunya mempunyai posisi filosofis dan ideologis yang berbeda).

Pada sidang yang pertama (31 Mei 1945), Soepomo menguraikan tiga teori tentang berdirinya suatu negara. Aneka teori tersebut adalah: teori individualistis (dengan Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Herbert Spencer, dan Laski sebagai pijakan filosofisnya), teori golongan/kelas (dengan Marx, Engels, dan Lenin sebagai filosof rujukannya), dan teori integralistik (dengan Spinoza, Adam Muller., dan Hegel sebagai pijakan filosofisnya).

Menurut Soepomo, Indonesia haruslah merupakan negara integralistik. Mengapa? Karena dalam negara integralistik inilah ada persatuan antara pemimpin dan rakyatnya. Negara seperti ini cocok dengan aliran pikiran ketimuran dan masyarakat Indonesia yang ada dalam adat. Dengan kata lain, Soepomo hendak mengatakan bahwa negara integralistik khas Indonesia mempunyai pijakan filosofis yang jelas.

Ideologi yang hendak ditolak bagi bangunan Indonesia merdeka, menurut Soepomo, dengan demikian adalah federalisme (yang mencuatkan keterpecahan) dan individualisme-liberalisme (yang menekankan kebebasan mutlak bagi individu), dan juga monarki.

Pada pidato berikutnya. M. Yamin juga mengatakan bahwa Indonesia baru nanti menolak paham federalisme, feodalisme, monarki, liberalisme, autokrasi, birokrasi, dan demokrasi khas barat. Dari sini saja tampak bahwa ada "perang ideologi" dalam konteks kemerdekaan Indonesia.

Dunia saat itu memang dilanda perang ideologi antara Barat yang menjunjung tinggi liberalisme dan Timur yang mempromosikan sosialisme. Para *founding fathers* tentu amat mengerti hal itu dan mencari pijakan filosofis dan sekaligus ideologis yang memadai bagi berdirinya Indonesia merdeka. Dari sini bisa dimengerti mengapa Soepomo mengajukan Hegel, Spinoza, dan Adam Muller bagi integralisme Indonesia (meskipun patut diberdebatkan apakah ketiga filosof tersebut berbicara mengenai negara integralistik). Pada bingkai itulah Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai Pancasila.

2.2. Gagasan Mengenai Pancasila

Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *philosofische Gronslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Sebelum mengutarakan gagasan mengenai dasar negara, Soekarno merasa perlu untuk meyakinkan para peserta sidang bahwa mereka tidak perlu terlalu memusingkan perkara yang kecil-kecil daripada kemauan untuk merdeka.

> Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, sampai jelimet!, maka saya bertanya kepada Tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka padahal delapan puluh persen dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.[1]

Kemauan dan hasrat untuk merdeka, menurut Soekarno, harus mendahului perdebatan mengenai dasar negara. Mengapa? Karena buat apa membicarakan dasar negara jika kemerdekaan tidak ada? Dari sini bisa dimengerti logika berpikir Soekarno yang terlebih dahulu menggelorakan semangat untuk merdeka, bahkan ketika rakyat masih miskin, belum bisa baca tulis, belum bisa mengendarai mobil, dan seterusnya. Dalam sidang yang dihadiri oleh 62 orang dari berbagai golongan, Soekarno bertanya:

> Kita ingin mendirikan Indonesia di *Weltanschauung* (atas dasar) apa? Marxismekah? *Sam Min Chu I* (ideologi yang digagas tokoh komunis Cina, Sun Yat Sen) kah? Atau dasar apakah?[2]

---

1 *Bdk.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (BPUPKI), 64

2 *Ibid.*

Argumentasi Soekarno mengenai dasar negara dibuka dengan suatu pertanyaan, "Apakah *Weltanschauung* (dasar dan filsafat hidup) kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia merdeka?" Selanjutnya Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan akhirnya Ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila, dan diusulkannya sebagai *Weltanschauung* negara Indonesia merdeka.

Pertama, Kebangsaan yang dimaksud Soekarno adalah *Nationale Staat* dan nasionalisme Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus merasa diri mempunyai satu bangsa dan tumpah darah yang sama, yakni Indonesia. Kedua, kebangsaan yang dimaksud oleh Soekarno ini bukanlah chauvinisme khas Hittler, maka prinsip kedua untuk menjaganya adalah perikemanusiaan (internasionalisme). Hal ini penting agar bangsa Indonesia merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Ketiga, permusyawaratan yang dimaksud Soekarno adalah perjuangan ide dari seluruh rakyat Indonesia lewat wakil-wakilnya demi mewujudkan kesejahteraan umum. Keempat, kesejahteraan sosial yang dimaksud Soekarno adalah kemakmuran yang harus bisa dinikmati oleh segenap warga Indonesia, karena untuk kepentingan inilah suatu bangsa terbentuk. Kelima, Ketuhanan yang dimaksud Soekarno adalah Ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan ini. Bangsa Indonesia mengakui keberadaan agama-agama, dan hendaknya ada rasa saling menghargai di antara mereka, karena dengan demikianlah bangsa Indonesia bisa disebut bangsa yang berbudaya. Soekarno berkata:

> Saudara-saudara! Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini, dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi.[3]

Selanjutnya lima asas tersebut kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun dengan urutan dan nama yang sedikit berbeda. Tulisan M. Yamin juga mengamini bahwa lahirnya Pancasila berasal dari Soekarno.

> Sila yang lima ini dinamai Bung Karno dalam uraian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di kota Jakarta 'Pancasila' yang berarti paduan lima buah sila.... Tanggal 1 Juni 1945 dianggap oleh Republik Indonesia sebagai

3 *Ibid.*

tanggal lahirnya ajaran Pancasila, dan Bung Karno diterima sebagai penggalinya.. [4]

Meski sudah menyatakan lima sila (Pancasila), dalam pidato selanjutnya Soekarno mengajukan usul untuk memeras lima dasar tersebut menjadi Trisila, yaitu: *socio-nationalism* (perasan dari kebangsaan dan kemanusiaan), *socio-democratie* (perasan dari keadilan sosial dan kerakyatan), dan Ketuhanan. Tidak berhenti di situ, Soekarno memeras lagi Trisila tersebut ke dalam Ekasila, yaitu "gotong-royong." Mengapa gotong-royong? Argumentasi yang dikemukkan Soekarno adalah karena ia menginginkan Indonesia buat semua.

Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong-royong.' Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong![5]

Dr. Suwarno menggarisbawahi adanya "penyederhanaan" Pancasila ke dalam Ekasila oleh Soekarno.[6] Suwarno berpendapat bahwa kelima sila itu berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan Indonesia yang *tulen*, yakni gotong-royong.[7] Suwarno mengatakan bahwa formulasi "perasan" ini hendak menghindari pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila. Maka ia menawarkan alternatif lain, yakni Trisila dan Ekasila, meski Soekarno sendiri pada akhir pidatonya menekankan lagi agar Pancasilalah yang diterima.

Formulasi formal dari Pancasila (atau bisa disebut sebagai Pancasila formal) itu mempunyai akar yang dalam pada kegotong-royongan masyarakat Indonesia. Akar inlah yang kemudian disebut sebagai Pancasila material oleh Notonagoro.[8] Pancasila formal tak lain adalah cetusan rasional (lewat penggalian bertahun-tahun) dari Pancasila material yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, hidup ketatanegaraan, lembaga sosial dan lain sebagainya yang bercirikan semangat gotong-royong.

---

4 *Bdk.* H. Muhammad Yamin, 1960, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, di Cipanas-Rumah Siguntang, 29 Mei 1960, 289.

5 *Op.Cit.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 82.

6 *Bdk.* Dr. P.J. Suwarno, SH., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan)*. Yogyakarta, Kanisius, 5

7 *Ibid.*

8 *Bdk.* Notonagoro, 1962, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila)*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7

Dengan mengatakan bahwa prinsip negara ini adalah gotong royong, Soekarno mau mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi klaim-klaim golongan, pribadi, dan kelompok apapun yang hendak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan bersama. Artinya, sebenarnya tidak boleh ada klaim mayoritas atas minoritas! Tidak boleh ada klaim warga pribumi atas peranakan! Tidak boleh ada klaim kaum kaya atas kaum miskin! Mengapa? Karena, kalau ada klaim-klaim tersebut, untuk apa ada Indonesia merdeka? Bukanlah semua itu bentuk dominasi dan penjajahan baru? Lebih dari itu, dengan mengatakan gotong-royong adalah prinsip dasar negara Indonesia Soekarno hendak mengatakan bahwa Indonesia didirikan untuk menjamin kepentingan semua warga Indonesia, apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan keadaan ekonominya.

2.3. Dialektika Multikulturalisme Di Indonesia

Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain-lain, sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Raymundus Sudhiarsa mengutip pernyataan Will Kymlica yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan msing-masing mempunyai integritas dan tantangannya sendiri-sendiri.[9]

Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya sudah muncul sejak pendiri bangsa mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Tetapi dewasa ini pemahaman akan multikulturalisme mulai keluar dari konsep dasar tersebut. Artinya, bagi bangsa Indonesia masa kini, konsep multikulturalisme menjadi sebuah terminologi yang baru dan asing.[10] Mengapa demikian? Karena kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini telah terdistorsi pada masa Orde Baru. Kesadaran akan multikulturalisme dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara. Muncullah kemudian paham "mono-kulturalisme" yang bercirikan penyeragaman atas berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya.

---

9 Raymundus Sudhiarsa SVD, 2008, *Kearifan Sosial Lintas Budaya* – SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja, Lamalera, 74

10 Parsudi Suparlan, 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal *Antropologi Indonesia ke-3,* Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, *(http://www.scripps.ohiou.edu/news/ cmdd/ artikel ps.htm*).

Berbagai contoh dapat dikemukakan di sini, misalnya: amuk masa, pembakaran tempat ibadah, aneka kerusuhan, main hakim sendiri, aneka pembunuhan, konflik bernuansa SARA, tindak kekerasan terhadap aliran agama tertentu (Ahmadiyah misalnya), dan aneka peristiwa tragis lainnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa berbagai kekisruhan etnis yang merebak di banyak tempat merupakan akibat dari rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme.

Konsep multikulturalisme tidak dapat begitu saja disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Multikulturalisme menekankan *keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan*. Ulasan mengenai multikulturalisme akan menyentuh berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik, demokrasi, keadilan, penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti, penghormatan atas golongan minoritas, prinsip-prinsip etika-moral, dan mutu produktivitas."[11]

Usaha untuk membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia. Kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai konsep multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya amat diperlukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.[12]

Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat demokratis yang multikultural, toleran, dan inklusif itu merupakan persemaian dari masyarakat madani (masyarakat "*tamaddun*" atau berperadaban mengacu seperti jaman Nabi Muhammad ketika di Madinah).[13]

Masyarakat *tamaddun* itu didiami oleh komunitas yang "sadar hukum." Dari sisi itu, penting kiranya untuk menangkap semangat *mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah) dalam konteks negara-bangsa Indonesia yang multikultural. Pendapat ini merupakan interpretasi atas paham multikultural yang sebenarnya amat problematis. Mengapa? Karena yang dijadikan pijakan berpikir adalah agama tertentu, sehingga tetap diperlukan sikap kritis atas pendapat Cak Nur ini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat "terbaik" yang memiliki "kemandiri-

---

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*, 2

13 Nurcholish Madjid, 1999, Pengantar [2] "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidayah, Bandung.

an" dalam aktivitas warga masyarakatnya dan berkembang sesuai dengan potensinya. Ini diwujudkan dengan memberlakukan nilai-nilai keadilan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Jadi, masyarakat madani adalah "masyarakat mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri", masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam demokrasi dengan berbagai perbedaan kelompok etnis, ras, suku bangsa, budaya, agama dan lain-lain sebagai wujud masyarakat multikultural.

Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang sangat majemuk, baik dari sisi budaya, suku bangsa, dan agama. Keragaman ini merupakan sebuah potensi yang bisa digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat madani di tanah air. Namun demikian, ia juga menyimpan potensi konflik yang bisa meledak setiap saat.

Pendukung gagasan pluralisme sering digolongkan dalam penganut relativisme. Bahkan tak jarang dari mereka yang dianggap sesat dan murtad. Sikap seperti itulah yang nampaknya diyakini oleh mayoritas ulama yang ada di MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI pun terdesak untuk mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Fatwa anti pluralisme yang dikeluarkan oleh MUI berdampak luas dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat yang semakin kuat untuk memusuhi dan menolak kelompok lain agama atau kepercayaan. Hal itu terbukti dengan sikap penolakan masyarakat yang semakin lantang terhadap keberadaan Jama'ah Ahmadiyah yang juga difatwakan oleh MUI sebagai aliran sesat.

Menurut Nurcholish Madjid, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*. Penggunaan konsep madani ini mendapat kritik dari kelompok lain yang menggunakan *"civil society'* dengan Muhammad Hikam sebagai pemikir utamanya. Perdebatan utamanya terletak pada bentuk masyarakat ideal. Walaupun kedua kelompok tersebut erat dengan "Islam kultural" namun hal ini menunjukkan bahwa contoh masyarakat Madinah amat problematis ketika hendak diterapkan bagi multikulturalisme Indonesia.

Gagasan *civil society* sebenarnya perlu didengungkan sebagai penyeimbang atas paham madani dalam mengerti multikulturalisme Indonesia. Secara historis Adam Ferguson (1723-1816), dalam karya klasiknya *"An Essay on History of Civil Society"* (1767) memaparkan titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil secara luas. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai wilayah yang mengedepankan pemenuhan hak-hak individu secara bebas. Masyarakat sipil merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial yang monarkis, feodal ataupun borjuis).

Konsep civil society lebih lanjut dikembangkan oleh kalangan pemikir berikutnya seperti Rousseau, Hegel, Marx, dan Tocqueville. Ide mengenai *civil society* menguat di Eropa antara abad ke-17 dan abad ke-18, ide itu muncul dari kondisi krisis. Secara umum krisis di Eropa abad ke-17 meliputi: komersialisasi tanah, tenaga kerja serta modal, pertumbuhan ekonomi pasar, abad penemuan/kebangkitan sains, hingga revolusi kontinental Inggris dan Amerika.

Jadi, konsep *civil society* lahir dan tumbuh dari daratan Eropa sekitar abad ke-17 M dalam konteks masyarakat yang mulai melepaskan diri dari dominasi agamawan dan para raja yang berkuasa atas dasar legitimasi agama. Agama saat itu mulai tersekularisasi, sehingga wewenang dan legitimasi kekuasaan mulai dilepaskan dari tangan agamawan. Di Eropa itu pula tumbuh ide demokrasi yang diawali dengan Revolusi Perancis (1789) dan tumbuh pula sistem ekonomi kapitalisme yang liberalistik. *Civil society* sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat pencerahan *(enlightenment)* yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai dasar negara yang menggantikan agama (gereja), dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarki. Dengan demikian, *civil society* aslinya adalah bersifat sekularistik dan mengesampingkan peran agama dari segala aspek kehidupan. Dan tentu saja *civil society* tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknya dengan konsep-konsep Barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, dan egalitarianisme.

Wacana masyarakat madani yang diusung oleh Nurcholish Madjid merupakan sumbangan pemikiran yang perlu diperhatikan dalam memperkuat Indonesia yang multikultural, akan tetapi, seperti diuraikan di atas, konsep negara madani ternyata dibingkai oleh motivasi agamis yang dikhawatirkan akan melawan konsep multikulturalisme itu sendiri. Mengapa? Karena semangat antitoleran (terutama yang bernuansa agamis) dikhawatirkan akan memberangus keberagaman Indonesia.

Semangat multikultural yang memandang bahwa semua adalah sederajat ternyata tidak ada dalam Piagam Madinah (misalnya tercermin dalam pasal 1: "sesungguhnya mereka satu umat, lain dari [komunitas] manusia lain"). [14]

Bahkan dalam pasal-pasal selanjutnya dibedakan antara yang beriman dan tidak, suku ini dan itu, lawan dan musuh, dst. Dari titik ini saja sebenarnya mengisyaratkan bahwa konsep madani tidak relevan bagi masyarakat Indonesia yang multikultural dan seharusnya sederajat.

---

14 *Bdk.* Lampiran Piagam Madinah dalam Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar

Kekuatan Nabi Muhammad dianggap sebagai kekuatan yang mempersatukan dalam konsep Negara Madani. Pertanyaan yang harus diajukan adalah: "apa yang terjadi setelah Muhammad tidak ada?" Dengan kata lain, ada kekuatan (kekuasaan kharismatis/regim) yang ada di dalamnya. Hal ini sebenarnya juga tidak perlu ada dalam bangunan masyarakat multikultural yang mengedepankan kesederajatan dan kebersamaan.

Negara-bangsa ini semenjak pertama kali berdiri sudah dihadapkan dan disadarkan dengan fakta kemajemukan di sana-sini, sehingga itu pula yang membuat para *founding father* melepaskan jubah-jubah perbedaan mereka. Mereka menyatukan serta merumuskan visi untuk membangun negara ini. Ancaman mendasar terhadap negara demokratis yang multikultural ini adalah munculnya budaya sektarian. Salah satu perwujudan sektarian adalah sikap antitoleran terhadap "yang lain".

Munculnya peraturan daerah (Perda) yang mengacu pada Syariat di beberapa daerah seperti di Tangerang, Indramayu dan Jember, segera menimbulkan persoalan bagi negara-bangsa multikultur dan demokratis seperti Indonesia. Tidak hanya karena Perda itu telah melanggar hirarki konstitusi, melainkan juga karena Perda itu sangat superfisial dan tidak substansial, seperti aturan memakai baju koko setiap hari Jumat bagi pria, perempuan wajib berjilbab, menunda pekerjaan saat azan tiba, larangan perempuan keluar malam, dan sebagainya. Sesungguhnya kasus itu tak perlu terjadi jika pemerintah daerah memiliki komitmen pada aturan main, bahwa negara-bangsa ini adalah negara hukum *(rechtstaat)* dan kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang multikultural.

Negara harus berangkat dari kepentingan seluruh elemen warga-negara yang multikultural ini, dimana dalam hal itu mereka diwakili parlemen dan dieksekusi pemerintah. Adanya Perda itu menandakan telah munculnya paham sektarian (golongan) dalam suatu komunitas pemerintahan daerah yang kemudian mengintervensi pembuatan aturan kemasyarakatan yang bersifat publik itu. Jika kekuatan sektarian itu dibiarkan berlarut-larut, maka bukan hanya saja mengancam namun juga dapat membinasakan karakter negara-bangsa Indonesia yang multikultural, secara lebih jauh mungkin Indonesia akan mengalami suatu kolaps sosial-kebangsaan.

Gejala sektarian itu tak lain pangkalnya bermula dari klaim kebenaran dari doktrin agama (dan juga ideologi) tertentu dan komunitas-umat dari agama. Berangkat dari situ kemudian terbentuklah pola pandangan komunal yang sempit, eksklusif, fundamentalistik, antipluralisme-multikulturalisme, dan antitoleransi.

Pluralitas zaman Nabi Muhammad tentu tidak bisa diterapkan begitu saja pada bangunan Indonesia merdeka. Betul bahwa agama memiliki kebenaran yang serba ideal karena berasal dari Tuhan sebagai pemilik

kebenaran yang mutlak. Tetapi, kebenaran agama bukanlah berada dalam ruang hampa yang bebas nilai. Agama bukanlah sesuatu yang otonom, melainkan berada dalam suatu realitas obyektif yang secara signifikan mempengaruhi, baik interpretasi maupun aktualisasi dari agama tersebut. Memang, idealnya, agama harus tampil sebagai kritik kebudayaan, atau bahkan sebagai pemusnah segala bentuk ideologi yang destruktif bagi kemanusiaan. Tetapi, pada faktanya, antara agama dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain, atau bahkan saling memperalat satu sama lain. Nuansa yang seperti ini merupakan peluang bagi terjadinya berbagai salah interpretasi agama yang menjurus pada terjadinya pembenaran agama secara sepihak.

Sebagai kritik kebudayaan, agama secara ideal harus ditempatkan sebagai fenomena dalam keragaman budaya (multikulturalisme). Artinya, saat agama mencoba menterjemahkan sebuah realitas sosial, maka ia pun harus mampu secara sinergis membangun kebersamaan dengan paham lain yang ada dalam realitas sosial tersebut. Namun demikian, adanya nuansa psikologis yang berbeda dalam pemeluk agama dan keragaman interpretasi agama, juga memungkinkan ia menjadi potensi konflik yang membahayakan integrasi sosial masyarakat.

Mewujudkan Indonesia yang multikultural adalah proyek besar bagi seluruh warga. Dari uraian di atas tampak bahwa konsep madani juga tidak memadai bagi keanekaragaman Indonesia. Oleh karena itu wacana masyarakat madani harus diimbangi pula dengan pemahaman multikultural yang mengedepankan kesederajatan dalam kebhinnekaan. Sebaliknya, konsep mengenai *civil society*-lah yang seharusnya dikedepankan dalam diskusi mengenai acuan yang memadai bagi Indonesia yang multikultural. Multikultural bukan hanya dicirikhasi oleh pluralitas. Lebih dari itu, harus ada kesederajatan di dalamnya.

2.4. Pancasila dan Multikulturalisma

Soekarno menggagas negara multikultur khas Indonesia dengan mengetengahkan konsep gotong-royong. Konsep gotong-royonglah yang memungkinkan semua unsur yang berbihinneka di tanah air Indonesia diakui keberadaannya. Konsep gotong-royong pulalah yang membuat pluralisme mekar dengan subur. Lebih lanjut, konsep gotong-royonglah yang membuat semua elemen yang ada bisa merasa sederajat dan menyumbang sesuatu bagi Indonesia. Jadi, tidak salah jika konsep gotong-royong menjadi dasar bagi bangunan Indonesia yang multikultural. Mengapa? Karena terminus gotong-royong itu sendiri pun merupakan sebuah cetusan pengedepanan semangat multikultural yang menghargai setiap perbedaan demi kemajuan bersama.

Soekarno memimpikan terwujudnya "Indonesia bagi semua," maka semua warga harus merasa sebagai orang Indonesia dan membangun

Indonesia yang sama. Dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 hal ini amat tampak:

> "Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua.[15]

Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Di dalam Pancasila, yang dijiwai oleh semangat gotong-royong, segala perbedaan sosial dilebur. Di sinilah letak keunggulan Pancasila sebagai landasan ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat. Namun beberapa orang, apakah itu dari pihak komunis maupun dari pihak agamis, dewasa ini merasa tidak puas dan mencoba menggantikannya. Sepanjang sejarah Indonesia berdiri, banyak usaha yang dilandasi ketidakpuasan ideologi dan ingin memajukan kelompoknya sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara.

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau berbentuk negara sekular. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. Konflik dan masalah-masalah yang *"njlimet"* (rumit) terjadi sampai akhirnya Soekarno berpidato tentang Pancasila sebagai *weltanschauung* bangsa. "Semua buat semua" serta "tiada egoisme agamis," demikian Soekarno berbicara. Eka Darmaputera menyimpulkan bahwa Indonesia merdeka 'bukanlah Negara Islam dan bukan Negara sekular,' tetapi negara Pancasila.[16]

Dasar untuk demokrasi ala Soekarno adalah "semua buat semua." Demokrasi seperti ini mengimplisitkan prinsip musyawarah dan bukannya suara terbanyak. Bagi Soekarno, suara terbanyak justru akan melahirkan kesewenang-wenangan dan penindasan atas minoritas. Soekarno tidak lagi menyetujui penggunaan terminologi minoritas-mayoritas dalam membangun tata demokrasi Indonesia. Mengapa? Karena terminologi itu lahir dari kultur liberal. Lebih dari itu, sebenarnya satu suara, bahkan yang berasal dari kelompok minoritas sekalipun, mempunyai arti yang sama bagi kehidupan bernegara. Sistem gotong-royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia jelas tidak meninggalkan kaum minoritas, bahkan sebaliknya, merangkul semua ke dalam suasana kebersamaan.

---

15 *Op.Cit.*, 1995, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 71

16 Eka Darmaputera, 1989, *Pancasila: Identitas dan Integritas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 291.

Menurut Soekarno, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni nasionalisme dan internasionalisme (perikemanusiaan). Itulah gotong-royong. Mengapa demikian? Karena ada nasionalisme yang tumbuh di luar prinsip kemanusiaan. Nasionalisme yang demikian adalah nasinalisme chauvinistis yang terjadi di Jerman yang meyakini bahwa *"Deutsschland uber Alles"*. Nasionalisme Indonesia harus tumbuh di atas kekeluargaan yang mampu mempersatukan aneka suku, agama, budaya, bahkan batas negara sekalipun. Paham gotong royong sebenarnya bukan hanya dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia saja, melainkan juga sangat ampuh dipakai oleh anggota masyarakat internasional (misalnya dalam kegiatan membantu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam). Pancasila menurut Soekarno diambil berdasarkan budaya bangsa secara "turun-temurun," dan "sebagai perasaan-perasaan rakyat yang selama ini terpendam diam-diam dalam hati rakyat."[17] Mpu Prapanca dalam Negara Kertagama-nya sudah memunculkan istilah Pancasila. Kemudian Mpu Tantular dalam *Sutasoma* memunculkan istilah Bhinneka Tunggal Ika." Tampak bahwa Pancasila adalah gambaran pribadi rakyat sedari dulu kala.[18]

Dalam kaitan dengan pergumulan agama-agama, Pancasila berintikan semangat "gotong royong," bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, dan bukan Budha. Namun ternyata poin ini tidak memuaskan bagi golongan Islam, karena tidak mewakili aspirasi kaum muslim. Titik terang sudah ada namun belum berjalan mulus. Panitia Sembilan dibentuk secara *ad hoc* untuk menangani kontroversi itu. Tanggal 22 Juni 1945 dihasilkanlah rumusan yang dikenal dengan nama "Piagam Jakarta." Di sini kaum Islam melampiaskan keinginannya dengan memasukkan tujuh kata kontroversial pada sila pertama, yang menandakan dominasi agama Islam sebagai mayoritas.

Salah satu anggota Panitia Sembilan yang beragama Kristen, AA Maramis mendapat 'batu sandungan', tetapi tidak berdaya juga. Hal itu nyata kelak dalam situasi menjelang pidato tangal 18 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus sore, seorang pemimpin Balatentara Jepang memberitahukan keberatan orang Kristen, terhadap rumusan dasar nagara yang dihasilkan Panitia Sembilan tersebut. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan YME dengan

---

17 *Lih*. Hadinoto, *Dialog dan Edukasi*, 24-30. Pengakuan Soekarno di depan para intelektual, khususnya dalam pengukuhan Doktor (HC) di Universitas Gajah Mada. Ia menggalinya dari alam kehidupan rakyat Indonesia.

18 Fakta yang diambil dari Adnan Buyung Nasution oleh IY Panggalo, 1998, *"Diskusi Menyangkut Dasar Negara RI dan Posisi orang Kristen di Indonesia"* dalam *Peran Serta Gereja dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Sinar harapan, 204.

beribadah menurut syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sangat meresahkan orang Kristen.

Saat itu juga Bung Hatta memanggil pemimpin-pemimpin Islam untuk membicarakan hal ini. Peran Bung Hatta dalam berdialog dan berkompromi secara rasional, sangat besar. Ia mengajukan kekhususan kata "Ketuhanan" konsep yang bersifat transenden di dunia ide melingkupi semua golongan agama dan ras, sehingga menjadi universal, ultima dan juga tunggal. Juga tentang frase "Yang Maha Esa" dimengerti oleh kaum Muslim sebagai 'tauhid' Islam. Hal tersebut tidak terlalu berat, karena Hatta sendiri adalah seorang muslim yang taat, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk menerima rumusan kompromis itu. Akomodasi filosofis dari Hatta tentang gagasan 'yang ultima' ternyata diasosiasikan pada "Yang Maha Esa." Akhirnya semua pihak tidak berkeberatan dan beranggapan bahwa Penguasa dan Pencipta itu adalah Tuhan yang Tunggal itu. Jadi sebenarnya "Yang Maha Esa" itu pun bukan monopoli Islam saja, tetapi Kristen, Hindu dll.

Sejalan dengan perubahan tersebut, batang tubuh UUD 45, khususnya pasal 29 disesuaikan dengan cara yang sama, yaitu menghapus tujuh kata yang sama. Inilah kekuatan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, sebagai kekuatan perangkum dan pengayom golongan-golongan agama yang berseteru. Hal itu terjadi sebelum pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 18 Agustus, sehingga negara yang baru lahir tersebut tidak seketika bubar. Inilah sebenarnya wujud semangat gotong-royong yang menjadi perasan Pancasila. Para pendiri negara sudah menginternalisasi dan bahkan mempraktekkan semangat gotong-royong dalam menggagas negara, meski dalam suasana yang genting sekalipun. Hasilnya: Indonesia didirikan untuk semua warga Indonesia. Dengan kata lain, jangan lagi menegepankan agama jika sudah berbicara mengenai ke-Indonesia-an. Semangat gotong-royong bangsa ini sudah terpatri dalam sanubari manusia Indonesia sejak semula. Hebatnya hal tersebut dilalui dengan musyawarah-mufakat dalam mencapai persetujuan bagi kebaikan bangsa yang majemuk secara keseluruhan.

Kesaktian Pancasila memang sudah tidak diragukan lagi atas kaum komunis bahkan agamis. Namun 'sumpah' Eka Prasetya Panca Karsa dari hasil TAP MPR IV/1978 di masa Orba terhadap seluruh lapisan masyarakat dan pranata sosial negara, mengesankan bahwa Pancasila harus dikuatirkan sekali lagi kesaktiannya bila berhadapan dengan agama-agama, khususnya agama Islam. Bahkan pernah kesaktiannya dipaksaan dengan azas tunggal bagi semua organisasi sosial keagamaan, bahkan termasuk institusi agama, termasuk gereja. Keekstriman Orde Baru menanamkan kesaktian Pancasila memang berhasil pada waktu itu. Metode indoktrinasi melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan

dan Pengamalan Pancasila) dialami bersama, termasuk para mahasiswa bahkan pelajar menengah. Secara terpisah, T.B. Simatupang pun menyetujui keharusan metode indoktrinasi ini, walau khusus dalam konteks menghadapi bahaya komunisme.[19] Namun 'kesaktian' yang demikian tidak bertahan lama juga, ketika Orba runtuh dan semangat reformasi memberontak. Dewasa ini bahkan di sana-sini muncul paham sektarian yang terkesan alergis terhadap Pancasila.[20]

Pancasila seakan-akan terhempas, bahkan tidak disegani lagi. Kaum agamis tertentu dewasa ini masih mencita-citakan hal lama, yaitu berdirinya negara Islam, bahkan kesannya tanpa toleransi lagi. Beberapa golongan nasionalis, termasuk kaum kristiani, menganggap bahwa Pancasila harus direvitalisasi sebagai *Welstanchauung* atau 'filsafat hidup' berbangsa dan bernegara yang selama ini ada. Bukan hanya sampai di situ, tetapi harus dilanjutkan pada tingkat bermasyarakat secara praktis sehari-hari agar ekses reformasi yang "kebablasan" sekarang ini (yang mengatasnamakan agama oleh segelintir 'petualang-petualang' politik-sosial-masyarakat yang mau melupakan sejarah perjalanan bangsa ini) bisa dieliminasi.

Perjuangan bangsa sekarang berada di antara dua kutub, yakni antara 'revitalisasi Pancasila' atau 'penggantian Pancasila dengan syariah.' Kalau yang kedua benar terjadi pasti akan muncul disintegrasi bangsa. Usaha-usaha segolongan kecil orang yang memunculkan golongannya sendiri pada masa reformasi ini terkesan menyimpan dendam historis yang masih membara, meskipun para pendahulu kita secara sadar dan ikhlas ingin bergotong royong membangun negara ini dari nol.

Lalu apa yang harus dilakukan? Di titik ini semua pihak harus menghayati pemahaman para pendiri negara ini dalam hal pengedepanan semangat kegotong-royongan, seperti yang diyakini Hatta. [21] Prinsip keislaman Hatta selalu dijiwai dengan keindonesiaan yang yang solid tanpa harus disertai dengan pemaknaan 'arabisasi' secara formal dan berlebihan (seperti yang terjadi pada generasi sekarang). Hal ini sudah nampak gejalanya, mulai dari munculnya Perda dan aneka peraturan/perundangan yang bernuansa syariah. Yang terjadi kemudian seakan-akan ada 'negara di dalam negara,' yang bagi para intelektual merupakan 'satu langkah lagi menuju merdeka.' Di sini, misalnya, perlu direfleksikan lagi: "Sudah tepatkah memberlakukan syariat Islam di Aceh?"

---

19 TB Simatupang, Harapan, 1986, *Keprihatinan dan Tekad: Angkatan '45 Merampungkan Tugas Sejarahnya*, Jakarta: Inti Idayu Press, 159.

20 T.B Simatupang, 1989, *Iman Kristen Dan Pancasila*, Jakarta: Gunung Mulia, 59.

21 *Bdk.* W.B. Sidjabat, 1982, *Religious Tolerance and Christian Faith*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 49.

Para pembuat Undang-undang seharusnya menyadari bahwa kekhususan yang dibuat semestinya masih menghargai Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Ada bahaya bahwa dalam situasi 'yang khusus' tersebut, Garuda Pancasila sudah tidak dianggap lagi, walapun secara formal masih tergantung di dinding atau dipajang di mimbar pemerintah daerah. Hal ini merupakan suatu ironi di dalam suatu negara berdaulat, di mana dikesankan bahwa dasar negara bisa diganti secara 'main belakang' (meskipun tidak konstitusional, tetapi dilegalkan).

Paham Pancasila dan "negara gotong-royong" yang dikumandangkan Soekarno seharusnya menjadi kemenangan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi ternyata hal ini dianggap sebagai kemenangan kaum nasionalis yang dicurigai sebagai sekularis semata-mata. Sebaliknya, kaum muslim merasa dikalahkan, dan konon ketidak-puasan mereka terasa sampai saat kini. Memang kekalahan politik bisa mengakibatkan dendam yang panjang turun temurun kepada generasi selanjutnya yang tidak matang, khususnya dalam 'kasus tujuh kata' versi Piagam Jakarta. Sakit hati yang tidak rasional itu semakin nyata, ketika individu-individu ingin memaksakan tindakan-tindakan atas nama agama terus menebar pengaruh dan bahkan teror kepada masyarakat.

4. Kesimpulan

Benang merah yang amat tampak dari beberapa tema di atas adalah bahwa semangat gotong-royong (yang diimani sudah mengakar dalam masyarakat dan kemudian ditemukan oleh Soekarno sebagai perasan Pancasila) ternyata dewasa ini menemui tantangan dalam hidup berbangsa. Kecenderungan yang merebak justru adalah semakin menipisnya semangat elitis, etnosentris, separatis, dan antiloteran di sana-sini. Kesan yang muncul dewasa ini adalah: adagium gotong-royong dimunculkan oleh pidato, padahal sebenarnya terminus gotong-royong dalam pidato Soekarno ini muncul dari realita masyarakat Indonesia yang direnungkan Soekarno sejak dahulu. Oleh karena itu, bangsa ini ada dalam suatu proyek besar dan panjang untuk mengembalikan lagi realitas gotong-royong dalam kehidupan bangsa yang multikultural ini.

Pidato mengenai Pancasila adalah ide mengenai kebangsaan. Indonesia, bagi Soekarno, didirikan buat semua. Ide kebangsaan di sini bukanlah prinsip ideologis semata, melainkan lebih berupa penghayatan bersama dalam kebersamaan dan kemajemukan. Kebangsaan bukan cuma sekedar persamaan tumpah darah dan tempat tinggal. Jauh melampaui itu, kebangsaan adalah soal bagaimana tiap warganya diikat oleh perasaan dan kehendak yang sama untuk maju di tengah keberagaman. Kebangsaan yang diusung Soekarno mengetengahkan prinsip gotong-royong di tengan multikulturalnya bangsa ini. Realitas

ini sebenarnya tampak ketika bencana tsunami melanda Aceh. Saat itu semua warga bangsa (bahkan dunia) tergerak untuk turun tangan dengan berbagai cara. Semua warga, tanpa dikomando, seakan diikat oleh rasa yang sama bahwa yang sedang menderita adalah sesama warga bangsa juga. Semua bergotong-royong membantu dengan caranya masing-masing. Inilah potret kebangsaan yang sesungguhnya dalam negara Pancasila Soekarno yang multikultural.

* **Agustinus Wisnu Dewantara**
Mahasiswa program doktor fakultas filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; dosen di STKIP Widya Yuwana, Madiun. Email: dewacm@yahoo.com

BIBLIOGRAFI

Dahm, Bernhard, 1965, *Sukarno and The Struggle for Indonesia Independence*, Ithaca, Cornell University Press

Darmaputera, Eka, 1989, *Pancasila: Identitas dan Integritas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia,

Darmodiharjo, Dardji., 1979, *Pokok-Pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang-Usaha Nasional, Surabaya

Faith, Herbert (ed), 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta, Pustaka LP3ES

Hadinoto, 1998, *Dialog dan Edukasi*, Universitas Gajah Mada.

Lubis, Todung Mulya, 2014, *"Bertumbuhnya Ideologi Kebencian,"* dalam Kompas 30-01-2014

Madjid, Nurcholis., 1999, *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*, pengantar dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidayah, Bandung.

Notonagoro, 1962, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila),* Yogyakarta, Universitas Gajah Mada

Notosusanto, Nugroho (ed), 1977, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Palmer, R.E., 2005, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammad), Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Panggalo, 1998, *"Diskusi Menyangkut Dasar Negara RI dan Posisi orang Kristen di Indonesia" dalam Peran Serta Gereja dalam Pembangunan Nasional,* Jakarta: Sinar harapan

Poespowardojo, Soerjanto, 1998, *Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya),* Jakarta. Gramedia

Riyanto, Armada., 2000, *Agama-Kekerasan, Membongkar Eksklusivisme*, Malang, STFT Widya Sasana

Sekretariat Negara Republik Indonesia,1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),* Jakarta.

Sidjabat, W.B., 1982, *Religious Tolerance and Christian Faith*, Jakarta: BPK Gunung Mulia

Simatupang,TB., 1986, *Keprihatinan dan Tekad: Angkatan '45 Merampungkan Tugas Sejarahnya*, Jakarta: Inti Idayu Press,

_____, 1989, *Iman Kristen Dan Pancasila***,** Jakarta: Gunung Mulia

Soekarno, 1960, *Dari Proklamasi sampai Gesuri*, Jakarta, Yayasan Prapanca

_____, 1957, *Kepada Bangsaku.* Jakarta, Panitia Pembinaan Djiwa Revolusi

Soemarno, *Pendidikan Pancasila*, Madiun: STKIP Widya Yuwana

Sudhiarsa, Raymundus, 2008, *Kearifan Sosial Lintas Budaya* – SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja, Lamalera

Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid,* Jogjakarta, Pustaka Pelajar

Suparlan, Parsudi., 2002, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural,* dalam *Jurnal Antropologi Indonesia ke-3,* Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Juli

Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia (Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan),* Yogyakarta: Kanisius

The Wahid Institute, 2014, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoletansi 2013,* Jakarta

Tilaar, HAR, 2004, *Multikulturalisme (Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional),* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Yamin, Muhammad H, 1960, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Cipanas-Rumah Siguntang, 29 Mei 1960.